



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**MANAJEMEN RISIKO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

MANAJEMEN RISIKO

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

A. Pendahuluan

Penilaian risiko merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penilaian ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Penilaian Risiko Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sampai tingkat kegiatan dan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar;
2. Pemetaan risiko pada tingkat kegiatan dan program pada penyelenggaraan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rencana tindak pengendalian atas Risiko di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

D. Penutup

Demikian laporan ini, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya.

Dibuat di Denpasar

Pada tanggal 23 Desember 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Denpasar




Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si.

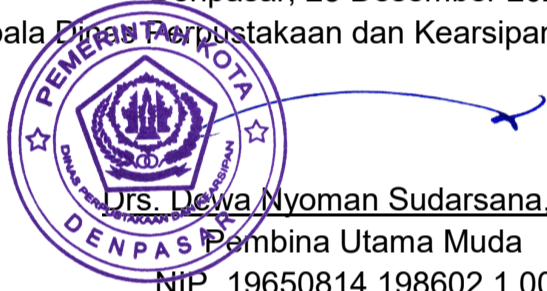
Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 19650814 198602 1 005


Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	:	2025		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		
Sumber Data	Renstra Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar			
Tujuan Strategis	Terwujudnya minat/budaya baca			
Sasaran Strategis	Meningkatnya minat/budaya baca masyarakat			
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target	
	1	Tingkat Kegemaran Membaca	69.75	
Program	Program Pembinaan Perpustakaan			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Terwujudnya minat/budaya baca			
	Sasaran Strategis: Meningkatnya minat/budaya baca masyarakat			
	IKU Strategis: Tingkat Kegemaran membaca sebesar 69.75			
	Program: Program Pembinaan Perpustakaan			
<p>Denpasar, 23 Desember 2024</p> <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar</p>  <p><u>Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650814 198602 1 005</p>				


Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	:	2025		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		
Sumber Data	Renstra Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar			
Tujuan Strategis	Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar			
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar			
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target	
	1	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73.13	
Program	Program Pengelolaan Arsip			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar			
	Sasaran Strategis: Meningkatnya pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar			
	IKU Strategis: Nilai rata-rata evaluasi kearsipan sebesar 73.13			
	Program: Program Pengelolaan Arsip			
<p>Denpasar, 23 Desember 2024</p> <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar</p>  <p>Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650814 198602 1 005</p>				


Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
Sumber Data	Renja Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar (Renja tahun 2025)	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Program pembinaan perpustakaan 3. Program pengelolaan arsip		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Terpenuhinya administrasi keuangan	100%
	2	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%
	3	Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah	100%
	4	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%
	5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terpenuhinya administrasi keuangan 2. Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah 3. Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah 4. Terpenuhinya jasa penunjang urusan perangkat daerah 5. Terpeliharanya barang milik daerah		
Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar  Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650814 198602 1 005			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	:	2025		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		
Sumber Data	Renja Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Terwujudnya minat/budaya baca			
Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar (Renja tahun 2025)	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Program pembinaan perpustakaan 3. Program pengelolaan arsip			
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan		Target
	1	Persentase pemustaka pertahun		3.15%
	2			
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Pembinaan Perpustakaan			
	Kegiatan: 1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota 2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota			
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase pemustaka pertahun			
<p>Denpasar, 23 Desember 2024</p> <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar</p>  <p>Dis. <u>Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650814 198602 1 005</p>				

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
Sumber Data	Renja Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar		
Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar (Renja tahun 2025)	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Program pembinaan perpustakaan 3. Program pengelolaan arsip		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik	3 Perangkat Daerah
	2	Jumlah perangkat daerah yang arsip statisnya dikelola dengan baik	3 Perangkat Daerah
	3	Terbentuknya jaringan informasi kearsipan tingkat Kabupaten/Kota	1 Aplikasi
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Pengelolaan Arsip Kegiatan: 1. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota 2. Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota 3. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik 2. Jumlah perangkat daerah yang arsip statisnya dikelola dengan baik 3. Terbentuknya jaringan informasi kearsipan tingkat Kabupaten/Kota		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar</p> <p><u>Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650814 198602 1 005</p> </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>			

	Program : Pengelolaan Arsip	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	Arsip belum tertata dan terkelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku	RSO.25.24.22.02	Kepala Bidang dan Pencipta arsip	Belum optimalnya sumber daya manusia terlatih yang memahami pengelolaan arsip sesuai dengan aturan dari ANRI serta sarana dan prasarana belum maksimal	Internal	C	Arsip tidak terkelola dengan baik	DPK dan Pencipta Arsip

Denpasar, 23 Desember 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar



Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 198602 1 005

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : RPJMD Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : 1. Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 2. Terwujudnya minat/budaya baca
 3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar

Sasaran Strategis OPD : 1. Meningkatnya penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 2. Meningkatnya minat/budaya baca masyarakat
 3. Meningkatnya pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan (100%)	Perencanaan	Terdapat perbedaan antara perencanaan dan kebutuhan	ROO.25.23.22.01	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Kurang teliti dalam merencanakan kebutuhan barang dan jasa	Internal	C	Target program tidak tercapai	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan (100%)	Pelaksanaan	Keterlambatan pembayaran gaji	ROO.25.23.22.02	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Terdapat perubahan gaji yang belum disesuaikan pada sistem gaji	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan pembayaran gaji	DPK
3			Perencanaan	Penerimaan gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan kebutuhan	RF.25.23.22.01	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	1) Itikad tidak baik dari pejabat perencana untuk mendapatkan keuntungan pribadi 2) Lemahnya pengawasan dari atasan langsung	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar
4			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.02	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran (100%)	Pelaksanaan	Belum terpenuhinya administrasi umum perkantoran secara maksimal	ROO.25.23.22.03	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Barang/Jasa yang tersedia di lapangan ternyata tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan yang telah ditetapkan	Internal dan Eksternal	C	Terdapat kekurangan anggaran yang tersedia dan kegiatan tidak dapat terealisasi dengan maksimal	Pemerintah Kota Denpasar
6			Perencanaan	Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan rencana pengadaan	RF.25.23.22.03	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Kesengajaan untuk merencanakan anggaran untuk digunakan demi kepentingan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar
7			Pelaksanaan	Mark up harga pengadaan barang	RF.25.23.22.04	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana, PPTK, Bendahara kegiatan	Kesengajaan untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi kepentingan pribadi	Internal dan Eksternal	C	Pemborosan keuangan daerah dan kualitas produk yang dibeli lebih rendah	Pemerintah Kota Denpasar
8			Pelaksanaan	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek terkait: - Katalog ATK - Katalog makan dan minum - Katalog alat kebersihan - Katalog sarana upacara	RF.25.23.22.05	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana, PPTK, Bendahara kegiatan	Salah satu penyedia diprioritaskan tanpa memperhatikan kualitas barang yang dimiliki serta kecocokannya dengan spesifikasi yang diminta agar bisa mendapatkan fee proyek dari penyedia tersebut	Internal dan Eksternal	C	Kualitas produk yang dibeli buruk atau lebih rendah	Pemerintah Kota Denpasar

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
												A
9			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.06	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah (100%)	Pelaksanaan	Pengadaan barang tidak dapat terealisasi secara maksimal melalui e-purchasing	ROO.25.23.22.04	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Pengadaan Barang terkendala TKDN	Eksternal	C	Keterlambatan pengadaan barang serta kemungkinan tidak maksimalnya proses pengadaan melalui mekanisme e-purchasing	DPK	
11			Perencanaan	Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan rencana pengadaan	RF.25.23.22.07	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Kesengajaan untuk menggunakan anggaran demi kepentingan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar	
12			Pelaksanaan	Mark up harga pengadaan belanja modal	RF.25.23.22.08	PPTK	Terdapat persekongkolan antara PPTK dengan penyedia untuk menaikkan harga barang demi kepentingan pribadi	Internal dan Eksternal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara dan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar	
13			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.09	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan perangkat daerah (100%)	Pelaksanaan	Penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang belum terpenuhi secara optimal	ROO.25.23.22.05	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Barang/Jasa yang tersedia di lapangan ternyata tidak sesuai kualitasnya dengan perencanaan pengadaan yang telah ditetapkan	Internal	C	Kegiatan tidak dapat terealisasi dengan maksimal	Pemerintah Kota Denpasar	
15			Perencanaan	Penganggaran untuk jasa yang tidak dibutuhkan	RF.25.23.22.10	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Komunikasi dilakukan tidak melibatkan pihak terkait seperti pengawas atau pimpinan demi keuntungan pribadi	Internal	C	Terjadi pemborosan anggaran	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar	
16			Pelaksanaan	Mark up harga dan rendahnya kualitas barang	RF.25.23.22.11	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Anggaran hendak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi	Internal dan Eksternal	C	Pemborosan keuangan daerah	Pemerintah Kota Denpasar	
17			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.12	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
18	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah (100%)	Pelaksanaan	Pemeliharaan untuk Barang Milik Daerah masih belum maksimal	ROO.25.23.22.06	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	Kerusakan pada Barang Milik Daerah melebihi dari prediksi biaya pemeliharaan serta waktu kerusakannya tidak dapat diprediksi	Internal dan Eksternal	C	Ada beberapa barang yang kurang maksimal dalam penggunaannya	Pemerintah Kota Denpasar	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
												A
19			Perencanaan	Time Plan Management untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan kebutuhan	RF.25.23.22.13	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana, dan Pengurus Barang	Pemilihan barang tidak dilaksanakan sesuai kebutuhan demi kepentingan pribadi	Internal	C	Target program tidak tercapai	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar	
20			Pelaksanaan	Penyalahgunaan kebutuhan pemeliharaan barang	RF.25.23.22.14	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana, dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran dimanipulasi untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	DPK	
21			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.15	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Fungsional Perencana	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
	Program Pembinaan Perpustakaan											
22	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase permustaka pertahun (3.15%)	Pelaksanaan	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota	ROO.25.23.22.07	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Belum optimalnya sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Internal dan Eksternal	C	Tidak terpenuhinya perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Pemerintah Kota Denpasar	
23			Perencanaan	Terdapat benturan kepentingan dalam pengadaan buku atau fasilitas perpustakaan	RF.25.23.22.16	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Terdapat pihak-pihak yang berkepentingan (PPTK, PPK, PA, Pimpinan dan Pengelola Perpustakaan) yang ikut campur dalam pengadaan untuk menguntungkan diri	Internal	C	Waktu pengadaan menjadi terhambat	DPK	
24			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.17	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
25	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase permustaka pertahun (3.15%)	Pelaksanaan	Peningkatan persentase pemustaka pertahunnya belum maksimal sehingga mempengaruhi tingkat minat/budaya baca masyarakat	ROO.25.23.22.08	Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Kurang optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait keberadaan dan fungsi perpustakaan daerah, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terkait minat baca, dan belum optimalnya pemahaman dari bidang bidang terkait terhadap fungsi perpustakaan	Internal dan Eksternal	C	Belum optimalnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
												A
26			Perencanaan	Penentuan tema kegiatan literasi beserta audiens berubah	ROO.25.23.22.09	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Terjadi perubahan skala prioritas kegiatan	Internal dan Eksternal	UC	Kegiatan di jadwal ulang beserta perubahan keperluan narasumber	DPK dan Pemustaka	
27			Perencanaan	Terdapat benturan kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan	RF.25.23.22.18	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Terdapat pihak-pihak yang berkepentingan (PPTK, PPK, PA, Pimpinan dan Pegiat Literasi Gemar Membaca) yang ikut campur dalam penyelenggaraan kegiatan literasi dan gemar membaca untuk menguntungkan diri sendiri	Internal dan Eksternal	C	Kegiatan literasi menjadi kurang optimal	Pemerintah Kota Denpasar	
28			Pelaksanaan	Suap menyuap peserta ke juri	RF.25.23.22.19	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Keinginan menang dari peserta	Eksternal	C	Reputasi kejuaraan menjadi tidak baik	DPK, Peserta Lomba, Juri	
29			Pelaksanaan	Subjektivitas Juri	RF.25.23.22.20	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Juri dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan	Eksternal	C	Hasil perlombaan menjadi tidak objektif	DPK, Peserta, Juri	
30			Pelaksanaan	Mark up biaya terkait pelaksanaan kegiatan	RF.25.23.22.21	Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	Pejabat bekerja sama dengan rekanan untuk menaikkan harga (mark up)	Internal dan Eksternal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
31			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.22	Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
	Program Pengelolaan Arsip											
32	Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik (3 Perangkat Daerah)	Pelaksanaan	Arsip belum terkelola dengan baik	ROO.25.24.22.10	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia terlatih terkait pengelola arsip	Internal	C	Terdapat banyak arsip yang hilang	DPK dan Pencipta Arsip	
33			Perencanaan	Benturan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia	RF.25.24.22.23	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	Anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Tujuan kegiatan tidak tercapai secara optimal	DPK	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
												A
34			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.24.22.24	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
35	Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persentase arsip statis yang terselamatkan (3 Perangkat Daerah)	Pelaksanaan	Masih terdapat arsip statis yang belum terselamatkan sehingga terjadi kerusakan	ROO.25.24.22.11	Kepala Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian Arsip	Belum maksimalnya penelusuran ke OPD terkait arsip statis	Eksternal	C	Belum semua arsip OPD terselamatkan	DPK dan Pencipta Arsip	
36			Perencanaan	Terdapat benturan kepentingan dalam perencanaan pengelolaan arsip statis	RF.25.24.22.25	Kepala Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian Arsip	Berupaya menggunakan anggaran demi kepentingan pribadi	Internal	C	Pengelolaan arsip statis tidak maksimal	DPK dan Pemilik Arsip	
37			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.24.22.26	Kepala Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian Arsip	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	
38	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Terbentuknya jaringan informasi kearsipan tingkat Kabupaten/Kota (1 Aplikasi)	Pelaksanaan	Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI	ROO.25.24.22.12	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia terlatih terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI dan kurangnya komitmen untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya informasi yang didapatkan baik diteruskan dari pusat atau dari lintas instansi kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	
39			Pelaksanaan	Petugas yang melaksanakan pengelolaan aplikasi SRIKANDI di OPD belum mendapatkan pelatihan	ROO.25.24.22.13	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	Terbatasnya sumber daya manusia terlatih sehingga pelatihan SRIKANDI ke OPD tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal	Internal dan Eksternal	C	Penggunaan aplikasi SRIKANDI belum optimal	Pemerintah Kota Denpasar	
40			Perencanaan	Benturan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia	RF.25.24.22.27	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	Terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadaan demi kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tidak berjalan lancar dan sesuai aturan	DPK dan Pemerintah Kota Denpasar	
41			Pertanggungjawaban	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.24.22.28	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian negara	Pemerintah Kota Denpasar	

Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Bidang Pembinaan dan Kearsipan Kota Denpasar

Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 198602 1 005

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Terwujudnya minat/budaya baca 3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Analisis Risiko			
		Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD				
1	Arsip belum tertata dan terkelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku	RSO.25.24.22.02	4	3	12
2	Kegiatan literasi terdapat peningkatan, namun belum memenuhi target yang ditetapkan	RSO.25.23.22.01	2	2	3
III	Risiko Operasional OPD				
1	Arsip belum terkelola dengan baik	ROO.25.24.22.10	4	4	16

2	Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI	ROO.25.24.22.12	4	4	16
3	Petugas yang melaksanakan pengelolaan aplikasi SRIKANDI di OPD belum mendapatkan pelatihan	ROO.25.24.22.13	4	4	16
4	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota	ROO.25.23.22.07	4	3	12
5	Penganggaran untuk jasa yang tidak dibutuhkan	RF.25.23.22.10	3	3	9
6	Time Plan Management untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan kebutuhan	RF.25.23.22.13	3	3	9
7	Penentuan tema kegiatan literasi beserta audiens berubah	ROO.25.23.22.09	3	3	9
8	Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan rencana pengadaan	RF.25.23.22.03	3	2	6

9	Pengadaan barang tidak dapat terealisasi secara maksimal melalui e-purchasing	ROO.25.23.22.04	3	2	6
10	Ketidaksiharian antara kebutuhan dan rencana pengadaan	RF.25.23.22.08	3	2	6
11	Benturan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia	RF.25.24.22.23	4	1	4
12	Benturan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia	RF.25.24.22.27	2	2	4
13	Keterlambatan pembayaran gaji	ROO.25.23.22.02	3	1	3
14	Penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang belum terpenuhi secara optimal	ROO.25.23.22.05	3	1	3
15	Pemeliharaan untuk Barang Milik Daerah masih belum maksimal	ROO.25.23.22.06	3	1	3

16	Mark up biaya terkait pelaksanaan kegiatan	RF.25.23.22.21	3	1	3
17	Terdapat perbedaan antara perencanaan dan kebutuhan	ROO.25.23.22.01	2	1	2
18	Peningkatan persentase pemustaka pertahunnya belum maksimal sehingga mempengaruhi tingkat minat/budaya baca masyarakat	ROO.25.23.22.08	1	2	2
19	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek terkait: - Katalog ATK - Katalog makan dan minum - Katalog alat kebersihan - Katalog sarana upacara	RF.25.23.22.05	1	2	2
20	Penerimaan gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan kebutuhan	RF.25.23.22.01	1	1	1
21	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.02	1	1	1

22	Belum terpenuhinya administrasi umum perkantoran secara maksimal	ROO.25.23.22.03	1	1	1
23	Mark up harga pengadaan barang	RF.25.23.22.04	1	1	1
24	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.06	1	1	1
25	Mark up harga pengadaan belanja modal	RF.25.23.22.08	1	1	1
26	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.09	1	1	1
27	Mark up harga dan rendahnya kualitas barang	RF.25.23.22.11	1	1	1
28	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.12	1	1	1

29	Penyalahgunaan kebutuhan pemeliharaan	RF.25.23.22.14	1	1	1
30	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.15	1	1	1
31	Terdapat benturan kepentingan dalam pengadaan buku atau fasilitas perpustakaan	RF.25.23.22.16	1	1	1
32	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.17	1	1	1
33	Terdapat benturan kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan	RF.25.23.22.18	1	1	1
34	Suap menyuap peserta ke juri	RF.25.23.22.19	1	1	1
35	Subjektivitas Juri	RF.25.23.22.20	1	1	1

36	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.22	1	1	1
37	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.24.22.24	1	1	1
38	Masih terdapat arsip statis yang belum terselamatkan sehingga terjadi kerusakan	ROO.25.24.22.11	1	1	1
39	Terdapat benturan kepentingan dalam perencanaan pengelolaan arsip statis	RF.25.24.22.25	1	1	1
40	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.24.22.26	1	1	1

41	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.24.22.28	1	1	1

Denpasar, 23 Desember 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar



Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 198602 1 005

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: 1. Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Terwujudnya minat/budaya baca 3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis OPD					
1						
III	Risiko Operasional OPD					
1	Arsip belum dikelola dengan baik	ROO.25.24.22.10	16	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	Belum optimalnya sumber daya manusia terlatih terkait pengelola arsip	Terdapat banyak arsip yang hilang

2	Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI	ROO.25.24.22.12	16	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia terlatih terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI dan kurangnya komitmen untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI	Terhambatnya informasi yang didapatkan baik diteruskan dari pusat atau dari lintas instansi kota Denpasar
3	Petugas yang melaksanakan pengelolaan aplikasi SRIKANDI di OPD belum mendapatkan pelatihan	ROO.25.24.22.13	16	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	Terbatasnya sumber daya manusia terlatih sehingga pelatihan SRIKANDI ke OPD tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal	Penggunaan aplikasi SRIKANDI belum optimal

Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar




Dis. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 198602 1 005

Form 7
 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
 (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: 1. Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Terwujudnya minat/budaya baca 3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
II	Risiko Strategis OPD						
II	Risiko Operasional OPD						
1	Arsip belum terkelola dengan baik	ROO.25.24.22.10	Mengadakan pendampingan dan menerima konsultasi terkait kearsipan	Masih terdapat beberapa pengelola arsip yang belum maksimal memahami pengelolaan arsip	Meningkatkan kapasitas pengelola arsip	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	1 Tahun
2	Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI	ROO.25.24.22.12	Melaksanakan pendampingan terhadap pengelola aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kota Denpasar kemudian memantau keaktifan pengguna dari hasil koordinasi yang didapat di intern perangkat daerah	Masih terdapat beberapa pengelola aplikasi yang belum maksimal memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI	Meningkatkan kapasitas pengelola aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kota Denpasar dan melakukan koordinasi dengan OPD pengguna aplikasi SRIKANDI	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	1 Tahun
3	Petugas yang melaksanakan pengelolaan aplikasi SRIKANDI di OPD belum mendapatkan pelatihan	ROO.25.24.22.13	Melaksanakan pendampingan terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI	Masih terdapat beberapa pengelola aplikasi yang belum maksimal memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelolaan SRIKANDI	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	1 Tahun

Denpasar, 23 Desember 2024
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar

 Dis. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650814 198602 1 005

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis	: 1. Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Terwujudnya minat/budaya baca 3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan kapasitas pengelola arsip	Bimtek	Narasumber	Peserta Bimtek	1 Tahun	1 Tahun	
2	Meningkatkan kapasitas pengelola aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kota Denpasar dan melakukan koordinasi dengan OPD pengguna aplikasi SRIKANDI	Pendampingan	Pembina Aplikasi	Pengelola Aplikasi	1 Tahun	1 Tahun	
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelolaan SRIKANDI	Bimtek	Pembina Aplikasi	Pengelola Aplikasi	1 Tahun	1 Tahun	

Denpasar, 23 Desember 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar



Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 198602 1 005

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2024 : 1. Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Terwujudnya minat/budaya baca 3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan kapasitas pengelola arsip	Bimtek	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	1 Tahun	1 Tahun	
2	Meningkatkan kapasitas pengelola aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kota Denpasar dan melakukan koordinasi dengan OPD pengguna aplikasi SRIKANDI	Pendampingan	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	1 Tahun	1 Tahun	
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelolaan SRIKANDI	Bimtek	Pembina Aplikasi SRIKANDI dan Pengelola Aplikasi	1 Tahun	1 Tahun	

Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar



Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 198602 1 005

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: 1. Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Terwujudnya minat/budaya baca 3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis OPD									
1	Kegiatan literasi terdapat peningkatan, namun belum memenuhi target yang ditetapkan	RSO.25.23.22.01		Belum tercapainya tingkat kunjungan pemustaka dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi	Penurunan IKK (IPLM)		Optimalisasi kegiatan perpustakaan keliling serta meningkatkan frekuensi kegiatan literasi	Optimalisasi kegiatan pusling baik dari segi lokus maupun keterlibatan siswa/siswi sekolah serta meningkatkan frekuensi kegiatan literasi dengan lokus perpustakaan anak dan perpustakaan kontainer		
2	Arsip belum tertata dan terkelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku	RSO.25.24.22.02		Belum optimalnya sumber daya manusia terlatih yang memahami pengelolaan arsip sesuai dengan aturan dari ANRI serta sarana dan prasarana belum maksimal	Arsip tidak terkelola dengan baik		Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola arsip	Memberikan pelatihan kepada pengelola arsip		
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional OPD									
1	Terdapat perbedaan antara perencanaan dan kebutuhan	ROO.25.23.22.01		Kurang teliti dalam merencanakan kebutuhan barang dan jasa	Target program tidak tercapai		Menyusun kembali daftar kebutuhan dan melaksanakan review terhadap daftar disusun	Menyusun kembali daftar kebutuhan dan melaksanakan review terhadap daftar disusun		
2	Keterlambatan pembayaran gaji	ROO.25.23.22.02		Terdapat perubahan gaji yang belum disesuaikan pada sistem gaji	Pegawai terlambat menerima gaji		Melanjutkan pelaksanaan penyesuaian data lebih awal pada aplikasi SIMGAJI	Melanjutkan pelaksanaan penyesuaian data lebih awal pada aplikasi SIMGAJI		

3	Penerimaan gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan kebutuhan	RF.25.23.22.01		1) Itikad tidak baik dari pejabat perencana untuk mendapatkan keuntungan pribadi 2) Lemahnya pengawasan dari atasan langsung.	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan pengecekan kembali sinkronisasi data pegawai serta diawasi oleh atasan langsung	Melaksanakan pengecekan kembali untuk sinkronisasi data pegawai serta dilaksanakan pengawasan oleh atasan langsung		
4	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.02		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan sinkronisasi laporan keuangan dengan laporan realisasi anggaran pada SIPD AKLAP	Melanjutkan sinkronisasi laporan keuangan dengan laporan realisasi anggaran pada SIPD AKLAP		
5	Belum terpenuhinya administrasi umum perkantoran secara maksimal	ROO.25.23.22.03		Barang/Jasa yang tersedia di lapangan ternyata tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan yang telah ditetapkan	Terdapat kekurangan anggaran yang tersedia dan kegiatan tidak dapat terealisasi dengan maksimal		Melanjutkan kembali pengusulan atau pencermatan anggaran untuk memenuhi administrasi umum perkantoran secara maksimal	Melaksanakan penelitian internal serta pengusulan atau pencermatan anggaran untuk memenuhi administrasi umum perkantoran secara maksimal		
6	Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan rencana pengadaan	RF.25.23.22.03		Kesengajaan untuk merencanakan anggaran untuk digunakan demi kepentingan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melakukan kembali pencermatan anggaran	Melakukan penelitian internal terkait rencana anggaran		
7	Mark up harga pengadaan barang	RF.25.23.22.04		Kesengajaan untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi kepentingan pribadi	Pemborosan keuangan daerah dan kualitas produk yang dibeli lebih rendah		Melanjutkan pemanfaatan E-Procurement dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan pemanfaatan E-Procurement dengan memperhatikan komitmen penyedia		
8	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek terkait: - Katalog ATK - Katalog makan dan minum - Katalog alat kebersihan - Katalog sarana upacara	RF.25.23.22.05		Salah satu penyedia diprioritaskan tanpa memperhatikan kualitas barang yang dimiliki serta kecocokannya dengan spesifikasi yang diminta agar bisa mendapatkan fee proyek dari penyedia tersebut	Kualitas produk yang dibeli buruk atau lebih rendah		Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan di dalam E-Katalog	Memperhatikan dan mengawasi proses pelaksanaan pengadaan di E-Katalog		
9	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.06		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan kembali pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan kembali pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia		
10	Pengadaan barang tidak dapat terealisasi secara maksimal melalui E-Purchasing	ROO.25.23.22.04		Pengadaan Barang terkendala TKDN	Keterlambatan pengadaan barang serta kemungkinan tidak maksimalnya proses pengadaan melalui mekanisme e-purchasing		Memastikan kembali barang yang dianggarkan sudah tersedia dengan sertifikat TKDN dan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi anggaran	Melaksanakan pengadaan barang yang ber TKDN serta sesuai dengan kebutuhan spesifikasi anggaran		

11	Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan rencana pengadaan	RF.25.23.22.07		Kesengajaan untuk menggunakan anggaran demi kepentingan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melaksanakan kembali pencermatan anggaran serta mengajukan perubahan anggaran	Melaksanakan penelitian internal terkait dengan kebutuhan barang dan barang yang diusulkan		
12	Mark up harga pengadaan belanja modal	RF.25.23.22.08		Terdapat persekongkolan antara PPTK dengan penyedia untuk menaikkan harga barang demi kepentingan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara dan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan		Melanjutkan evaluasi terkait dengan pengadaan barang agar sesuai dengan pengadaan dan spek yang dibutuhkan	Melaksanakan penelitian internal dengan pengadaan barang agar sesuai dengan pengadaan dan spek yang dibutuhkan		
13	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.09		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia		
14	Penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang belum terpenuhi secara optimal	ROO.25.23.22.05		Barang/Jasa yang tersedia di lapangan ternyata tidak sesuai kualitasnya dengan perencanaan pengadaan yang telah ditetapkan	Kegiatan tidak dapat terealisasi dengan maksimal		Melanjutkan kembali melaksanakan review atas perencanaan pengadaan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan barang di lapangan	Melakukan penelitian internal terkait rencana pengadaan		
15	Penganggaran untuk jasa yang tidak dibutuhkan	RF.25.23.22.10		Komunikasi dilakukan tidak melibatkan pihak terkait seperti pengawas atau pimpinan demi keuntungan pribadi	Terjadi pemborosan anggaran		Meningkatkan kembali komunikasi dengan pihak terkait terkait serta meningkatkan pengawasan proses kegiatan	Melaksanakan penelitian internal terhadap usulan kegiatan dari bidang-bidang		
16	Mark up harga dan rendahnya kualitas barang	RF.25.23.22.11		Anggaran hendak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi	Pemborosan keuangan daerah		Memanfaatkan kembali E-Procurement secara maksimal serta memastikan komitmen penyedia untuk bertanggung jawab menyediakan barang sesuai spesifikasi kebutuhan tanpa memberikan celah	Memanfaatkan kembali E-Procurement secara maksimal serta memastikan komitmen penyedia untuk bertanggung jawab menyediakan barang sesuai spesifikasi kebutuhan tanpa memberikan celah kecurangan		
17	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.12		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia		
18	Pemeliharaan untuk Barang Milik Daerah masih belum maksimal	ROO.25.23.22.06		Kerusakan pada Barang Milik Daerah melebihi dari prediksi biaya pemeliharaan serta waktu kerusakannya tidak dapat diprediksi	Ada beberapa barang yang kurang maksimal dalam penggunaannya		Melanjutkan pengusulan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk pemeliharaan barang dan meningkatkan rasa memiliki terhadap barang oleh pengguna sehingga barang dapat terpelihara dengan baik	Melanjutkan pengusulan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk pemeliharaan barang dan meningkatkan rasa memiliki terhadap barang oleh pengguna sehingga barang dapat terpelihara dengan baik		
19	Time Plan Management untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan kebutuhan	RF.25.23.22.13		Pemilihan barang tidak dilaksanakan sesuai kebutuhan demi kepentingan pribadi	Target program tidak tercapai		Melanjutkan review atas perencanaan dan pelaksanaan atas Time Plan Management pemeliharaan Barang Milik Daerah	Melakukan penelitian internal terhadap usulan pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Time Plan Management pemeliharaan Barang Milik Daerah		

20	Penyalahgunaan kebutuhan pemeliharaan barang	RF.25.23.22.14		Anggaran dimanipulasi untuk kepentingan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan pengawasan dan penjadwalan pemeliharaan	Melanjutkan pengawasan dan penjadwalan pemeliharaan		
21	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.15		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia		
22	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota	ROO.25.23.22.07		Belum optimalnya sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Tidak terpenuhinya perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan menganggarkan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
23	Terdapat benturan kepentingan dalam pengadaan buku atau fasilitas perpustakaan	RF.25.23.22.16		Terdapat pihak-pihak yang berkepentingan (PPTK, PPK, PA, Pimpinan dan Pengelola Perpustakaan) yang ikut campur dalam pengadaan untuk menguntungkan diri sendiri	Waktu pengadaan menjadi terhambat		Melanjutkan pengadaan sesuai pedoman pengadaan barang jasa serta pemilihan koleksi sesuai kebutuhan dan usulan pemustaka	Melanjutkan pengadaan sesuai pedoman pengadaan barang jasa serta pemilihan koleksi sesuai kebutuhan dan usulan pemustaka		
24	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.17		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia		
25	Peningkatan persentase pemustaka pertahunnya belum maksimal sehingga mempengaruhi tingkat minat/budaya baca masyarakat	ROO.25.23.22.08		Kurang optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait keberadaan dan fungsi perpustakaan daerah, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terkait minat baca, dan belum optimalnya pemahaman dari bidang bidang terkait terhadap fungsi perpustakaan	Belum optimalnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan		Melanjutkan menggandeng bunda literasi, melanjutkan sosialisasi fungsi dan keberadaan perpustakaan umum daerah, dan budaya gemar membaca kepada masyarakat, peningkatan kegiatan literasi pada perpustakaan kontainer	Melanjutkan menggandeng bunda literasi, melanjutkan sosialisasi fungsi dan keberadaan perpustakaan umum daerah, dan budaya gemar membaca kepada masyarakat, peningkatan kegiatan literasi pada perpustakaan kontainer		
26	Penentuan tema kegiatan literasi beserta audiens berubah	ROO.25.23.22.09		Terjadi perubahan skala prioritas kegiatan	Kegiatan di jadwal ulang beserta perubahan keperluan narasumber		Menentukan jadwal event sesuai dengan bulan yang direncanakan	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan jadwal event		
27	Terdapat benturan kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan	RF.25.23.22.18		Terdapat pihak-pihak yang berkepentingan (PPTK, PPK, PA, Pimpinan dan Pegiat Literasi Gemar Membaca) yang ikut campur dalam penyelenggaraan kegiatan literasi dan gemar membaca untuk menguntungkan diri sendiri	Kegiatan literasi menjadi kurang optimal		Tetap berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menyusun rancangan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	Tetap berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menyusun rancangan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan		

28	Suap menyuap peserta ke juri	RF.25.23.22.19		Keinginan menang dari peserta	Reputasi kejuaraan menjadi tidak baik		Mengajak kembali segenap stakeholder kegiatan seperti akademisi, pengiat literasi, dan pustakawan untuk mengambil keputusan secara kolektif sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih objektif	Berkoordinasi dengan stakeholder kegiatan seperti akademisi, pengiat literasi, dan pustakawan untuk mengambil keputusan secara kolektif sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih objektif		
29	Subjektivitas Juri	RF.25.23.22.20		Juri dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan	Hasil perlombaan menjadi tidak objektif		Mengarahkan dan mengawasi pelaksana kegiatan baik panitia, juri, dan peserta untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	Mengarahkan dan mengawasi pelaksana kegiatan baik panitia, juri, dan peserta untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan		
30	Mark Up Biaya Terkait Pelaksanaan Kegiatan	RF.25.23.22.21		Pejabat bekerja sama dengan rekanan untuk menaikkan harga (mark up)	Berpotensi menimbulkan keuangan negara		Melanjutkan pengawasan dari pimpinan sendiri, pengendalian internal, mengikuti aturan yang berlaku mengacu pada peraturan yang berlaku (Perwali Standar Biaya Jasa dan Standar harga Barang)	Melanjutkan pengawasan dari pimpinan sendiri, pengendalian internal, mengikuti aturan yang berlaku mengacu pada peraturan yang berlaku (Perwali Standar Biaya Jasa dan Standar harga Barang)		
31	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.23.22.22		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia		
32	Arsip belum terkelola dengan baik	ROO.25.24.22.10		Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia terlatih terkait pengelola arsip	Terdapat banyak arsip yang hilang		Meningkatkan kapasitas pengelola arsip	Mengadakan bimtek dengan mengundang narasumber dari ANRI dan provinsi		
33	Benturan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia	RF.25.24.22.23		Anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi	Tujuan kegiatan tidak tercapai secara optimal		Melaksanakan kegiatan pengadaan menyelaraskan dengan peraturan yang ada	Melaksanakan kegiatan pengadaan menyelaraskan dengan peraturan yang ada		
34	(Tahap pertanggungjawaban) penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.24.22.24		1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian negara		Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia	Melanjutkan kembali pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing dengan memperhatikan komitmen penyedia		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar



Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 198602 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2025**